

calon akan melakukan apa saja demi meraih kursi tersebut, dengan memanfaatkan isu agama, etnis, kedaerahan dan uang. Memang dalam dua pilkada serentak tersebut, terdapat dua kursi yang diperebutkan (kursi gubernur dan bupati/walikota). Tetapi karena tidak terjadi koalisi pendukung pasangan calon yang sama antara pilkada gubernur dan pilkada kabupaten/kota, maka masing-masing pasangan calon dan pendukungnya cenderung mengerucut untuk berebut satu kursi. Celaknya, pada situasi seperti itu, aparat keamanan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengantisipasinya. Dalam pilkada yang berserakan waktunya, kekurangan aparat keamanan di daerah yang sedang melaksanakan pilkada, bisa dibantu dari daerah lain yang tidak melaksanakan pilkada. Sedangkan dalam dua pilkada serentak, semua aparat keamanan sepenuhnya konsentrasi di masing-masing daerah, yang secara rasio jumlahnya tidak sebanding dengan ketegangan dan potensi konflik. Pada titik inilah pengaturan dua pilkada serentak bisa menjadi blunder, menciptakan kekerasan dan kerusuhan yang lebih besar, sehingga penghematan biaya jadi tidak ada artinya. Dua pilkada serentak juga menimbulkan kebingungan pemilih yang luar biasa, sehingga bisa meningkatkan potensi kekerasan dan kerusuhan. Pemilih bingung karena koalisi partai politik pendukung pasangan calon tidak jelas. Misalnya, path pemilihan gubernur Partai A dan Partai B,

berkoalisi dengan Partai C dan Partai D untuk mengusung pacangan calon gubernur, tetapi pada pemilihan bupati/walikota Partai A berkoalisi dengan Partai C dan Partai E, sehingga pendukung Partai A dan partai-partai lainnya dibingungkan oleh pilihan politik partainya. Partai politik tidak menyadari, bahwa ini merupakan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik.

Pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal ini merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representatif. Sebuah pengalaman berdemokrasi yang jika dilihat dari pluralitas negeri kita tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban. Pelaksanaan pilkada secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan selama ini ternyata cukup banyak mendapat tantangan internal. Kerusuhan yang terjadi selama ini telah mencoreng hitam wajah bangsa ini di negeri yang dipuji sebagai salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, predikat hebat itu hilang seketika akibat berbagai masalah dan kerusuhan yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan pilkada. Pemilu serentak seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan efektif dalam konteks NKRI.